

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Infrastruktur Tahun 2020-2022, hasil penelitian menunjukkan ada upaya positif dari pemerintah untuk mengupayakan peruntukan APBD dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2020-2022. Hal tersebut di lihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memastikan infrastruktur sebagai prioritas data indikator kerja yang menjadi tujuan, Alokasi anggaran baik efisiensi dan efektifitas serta pembangunan infrastruktur yang telah di lakukan sepanjang tahun 2020-2022 yang turut membuat laju pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 6% setiap tahunnya.

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini sehingga dapat disimpulkan bahwa apa yang telah di kerjakan untuk mendukung Pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2020-2022 melalui APBD telah optimal. Selanjutnya dapat di ketahui terdapat berbagai hambatan yang ada baik pada kondisi pandemi maupun pasca pandemi Covid-19 pada tahun 2020, 2021, 2022 yang menyebabkan banyak kegiatan di reconfusing. Adapun secara lengkap menurut hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan melalui tiga indikator teori optimalisasi menurut Siringoringo yaitu:

1. Dimensi Tujuan:

Dapat di ketahui dalam Optimalisasi APBD untuk mendukung Pembangunan Infrastruktur di Kota Depok Pada Tahun 2020-2022 sudah terdapat Tujuan, adapun tujuan tersebut di dasarkan pada Isu Prioritas dan manfaat dari infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan menurut data indikator capaian kerja secara mayoritas dari tahun 2020-2022 untuk Pembangunan infrastruktur telah mencapai target yakni sebanyak 27 dan tidak mencapai target sebanyak 10. selanjutnya dapat di ketahui sepanjang

tahun 2020-2022 laju pertumbuhan ekonomi kota Depok meningkat 6% setiap tahunnya. Dapat diketahui terdapat berbagai langkah yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan dari penggunaan APBD untuk pembangunan Infrastruktur dengan memaksimalkan penggunaan dari PAD kota Depok yang secara positif melebihi apa yang sudah di targetkan dengan presentase 106,49% pada 2020, 113,88% pada tahun 2021 dan 106,43% pada tahun 2022. Melakukan pemantauan dalam bentuk *controlling* untuk mengetahui sejauh mana program telah terlaksana dan bagaimana ketepatan sarannya yang termuat dalam kegiatan evaluasi.

2. Alternatif Keputusan

Berdasarkan eksplorasi peneliti pada dimensi alternatif keputusan, dalam perjalannya dapat di ketahui pemerintah kota Depok telah mengambil berbagai keputusan penting untuk mencapai apa yang sudah menjadi tujuan. Keputusan tersebut di dasarkan pada kondisi tantangan yang ada dalam kurun waktu 2020-2022, Adapun keputusan tersebut berupa aktivitas untuk mencapai tujuan dan pilihan aktivitas seperti kondisi akibat dari perkembangan kondisi nasional maupun internasional yang turut mempengaruhi ekonomi, kesehatan, maupun politik lokal. Dengan adanya perkembangan kondisi tersebut mendorong pemerintah kota Depok berupaya untuk melakukan perubahan pada RKPD tahun 2020-2022 untuk memastikan apa yang sudah menjadi peruntukan APBD dapat sesuai dengan target yang ada. Dalam kondisi ini dapat di ketahui pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas walaupun secara asumsi kebijakan anggaran masih terdapat dampak dari pandemi covid-19 sepanjang tahun 2020-2022. Perubahan opsi tersebut dapat di ketahui juga menimbang dari pada aspirasi masyarakat dan berpedoman pada kriteria yang sudah di tetapkan dalam Undang-undang, RKPD dan RPJMD melalui evaluasi triwulan. Selanjutnya pemerintah kota Depok membuat peluang untuk berkolaborasi baik pada pemerintah pusat, provinsi dan swasta, dan dapat di ketahui pada tahun 2021 pemerintah Kota Depok telah membuat aturan untuk mengatur CSR dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur,

upaya tersebut dapat berdampak pada efisiensi anggaran APBD dan dapat mengurangi beban pada APBD serta mempercepat pembangunan. Berdasarkan Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut, berdasarkan data dapat di ketahui bahwa adanya peningkatan Pembangunan infrastruktur di kota Depok pada tahun 2020-2022 walaupun tidak signifikan.

3. Dimensi Sumberdaya terbatas

Berdasarkan penelitian yang di lakukan, dari adanya sumberdaya yang terbatas dapat diketahui bahwa pemerintah kota Depok telah melakukan alokasi anggaran 21% pada tahun 2020, 23% tahun 2021, 25% tahun 2022 hal tersebut didasarkan pada pemetaan terhadap sejumlah sektor untuk menjadi sumber pemasukan daerah baik melalui pajak, dan retribusi pajak. Selain itu dapat di ketahui bahwa ada kebutuhan alokasi belanja lain yang juga menjadi beban terhadap APBD cukup besar yakni seperti belanja pegawai dan operasional. Dalam segi Peraturan atau undang-undang yang mendukung tidak ada yang mengatur secara pasti besaran alokasi yang di berikan APBD secara konsisten setiap tahunnya selain pada tahun 2022 baru ada kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar 40% dengan ketentuan perlu ada penyesuaian lebih lanjut sampai pada 2025, selain itu aturan alokasi wajib infrastruktur hanya terdapat pada UU APBN sebesar minimal 25% dari penggunaan DTU yang besaran anggarannya tidak pasti namun secara efisien dan efektifitas anggaran yang ada untuk Pembangunan infrastruktur secara keseluruhan cukup positif.

5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang di lakukan, maka saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Infrastruktur Tahun 2020-2022 mencakup sebagai berikut:

5.2.1. Saran Teoritis

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa penelitian yang berjudul Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Infrastruktur Tahun 2020-2022 masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas perolehan data spesifik berupa ketepatan dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan serta sebaran pembangunan infrastruktur, selain itu peneliti selanjutnya juga dapat menganalisis kinerja anggaran untuk melihat dampak realisasi anggaran yang ada. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan metode yang lebih holistik agar hasil yang diperoleh dapat digeneralisasikan. Maka demikian, peneliti selanjutnya diharapkan mampu melakukan penelitian yang lebih baik dan memberikan informasi yang lebih sempurna.

5.2.2. Saran Praktis

1. Kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Depok (Bappeda) maupun instansi lain dalam hal ini pemerintah kota Depok dapat meningkatkan transparansi informasi kinerja baik tercantum dalam bentuk website maupun lainnya, sehingga memudahkan masyarakat melihat dan mengetahui perancangan kota Depok ke depan.
2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal ini memperkuat aspirasi masyarakat dan juga memperkuat realisasi program pembangunan infrastruktur mencakup manajemen infrastruktur.
3. Kepada Pemerintah Kota Depok agar memperkuat analisis identifikasi serta penyelesaian masalah yang komperhensif, baik persoalan infrastruktur maupun lainnya.